

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran pedagang kaki lima di ruang publik, terutama di daerah perkotaan, telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam studi perkotaan dan spasial (Alfiansyah, A, & Muliana, 2022). Ruang informal yang mereka tempati *sering kali* memiliki fungsi ganda (Widjajanti, 2014), baik sebagai tempat kegiatan ekonomi maupun sebagai ruang publik yang didesain untuk mobilitas masyarakat, seperti jalur pejalan kaki dan jalan lokal (Widjajanti, 2009). Namun, keberadaan pedagang kaki lima di lokasi-lokasi strategis *sering kali* menimbulkan permasalahan, seperti terganggunya fungsi utama ruang publik yang seharusnya digunakan untuk pergerakan pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor (Widjajanti, Kurniawati, et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi (Mufarikah, 2021) individu dengan fungsi ruang yang dirancang untuk kepentingan bersama, sehingga penting untuk memahami lebih dalam (Setiawan et al., 2020) bagaimana pedagang kaki lima memanfaatkan ruang-ruang tersebut.

Di Lhokseumawe, fenomena ini terlihat nyata di area dengan aktivitas tinggi seperti Pasar Buah Pusong dan Pasar Inpres Tumpok Teungoh. Di tempat ini, mayoritas ruang publik dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima tanpa pengaturan resmi. Penggunaan ruang yang tidak tepat telah mengakibatkan penyempitan jalur pejalan kaki, kemacetan, serta penurunan mutu ruang Kota (Nia Asari, 2023). Akan tetapi, di sisi lain, area-area tersebut mencerminkan orientasi spasial masyarakat terhadap ruang perkotaan, yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kebutuhan ekonomi, dan kebiasaan lokal (Setiawan et al., 2020).

Pendekatan arsitektur, khususnya fenomenologi arsitektur, memberikan perspektif bahwa ruang bukan hanya entitas fisik, tetapi juga tempat yang dimaknai melalui pengalaman, relasi sosial, dan aktivitas manusia (Seamon, 2000; LeGates & Lefebvre, 2015). Dalam konteks ini, pedagang kaki lima merupakan aktor yang secara aktif membentuk ruang melalui praktik adaptasi dan improvisasi. Mereka menciptakan struktur ruang yang bersifat organik,

intuitif dan kontekstual terhadap kondisi fisik serta sosial ekonomi kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap ruang tidak hanya ditentukan oleh desain formal, tetapi juga oleh proses interaksi dan pengalaman keseharian yang membentuk keterikatan spasial secara emosional dan fungsional (Sandhika et al., 2024; Jacobs, 1961).

Melihat fenomena tersebut, jelas bahwa area yang digunakan oleh pedagang kaki lima bukan hanya ruang fungsional, tetapi juga menjadi lokasi yang memiliki arti sosial, ekonomi, dan kultural bagi Penggunaanya (Seamon, 2000). Praktik pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima menunjukkan bahwa fokus pada lokasi bukan hanya hasil dari perencanaan teknis, melainkan terbentuk melalui pengalaman harian, hubungan sosial, dan strategi penyesuaian terhadap lingkungan (Sandhika et al., 2024). Oleh sebab itu, penting untuk mempertanyakan cara pedagang kaki lima memahami dan membangun orientasi terhadap ruang yang mereka gunakan, bagaimana praktik spasial tersebut berperan dalam dinamika ruang Kota, serta bagaimana pendekatan arsitektural bisa merespons keberadaan mereka secara konstruktif dan kontekstual (Carr & Francis, 2007). Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selanjutnya menjadi landasan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Bagaimana orientasi tempat pedagang kaki lima terbentuk dan dimaknai dalam konteks fenomena arsitektur di kawasan pasar Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi fisik ruang (*Place*) yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Buah Pusong dan Pasar Inpres Tumpok Teungoh di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana pola penggunaan ruang berdasarkan pengalaman dan aktivitas pedagang kaki lima (*Lifeworld*) dalam memanfaatkan ruang informal di kawasan pasar?
3. Bagaimana pemaknaan serta keterikatan pedagang kaki lima terhadap ruang yang mereka gunakan (*home*) dalam aktivitas berdagang sehari-hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi fisik ruang (*Place*) yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Buah Pusong dan Pasar Inpres Tumpok Teungoh di Kota Lhokseumawe.
2. Menganalisis pola penggunaan ruang berdasarkan pengalaman, aktivitas, dan kebiasaan pedagang kaki lima (*Lifeworld*) dalam memanfaatkan ruang informal di kawasan pasar.
3. Mengkaji makna serta keterikatan pedagang kaki lima terhadap ruang yang mereka gunakan (*home*) sebagai bagian dari strategi bertahan hidup secara ekonomi.
4. Merumuskan arahan atau rekomendasi penataan ruang publik yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap keberadaan pedagang kaki lima berdasarkan hasil analisis fenomenologi arsitektur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu arsitektur, khususnya dalam kajian fenomenologi arsitektur terhadap ruang publik. Selain itu, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara manusia dan ruang melalui konsep *Place*, *Lifeworld*, dan *home*, terutama dalam konteks aktivitas pedagang kaki lima di ruang informal perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perencana kota dalam menjawab persoalan tata ruang akibat aktivitas pedagang kaki lima, khususnya di kawasan pasar tradisional. Temuan mengenai pola orientasi dan adaptasi ruang pedagang kaki lima dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penataan ruang yang

lebih inklusif dan memberdayakan. Selain itu, dari sisi arsitektur, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya desain ruang publik yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Buah Pusong dan Pasar Inpres Tumpok Teungoh di Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian diarahkan pada penggunaan ruang publik dan semi-publik yang tidak sesuai dengan tata ruang formal, seperti trotoar, badan jalan, dan ruang transisi di sekitar pasar. Kajian ini menitikberatkan pada aspek spasial dan perilaku pemanfaatan ruang, khususnya dalam hal pemilihan lokasi, pengaturan posisi berdagang, serta adaptasi ruang berdasarkan kebutuhan fungsional, visibilitas, dan kenyamanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi arsitektur untuk memahami pengalaman, aktivitas, dan makna ruang (*Place*, *Lifeworld*, dan *home*) yang terbentuk dari interaksi pedagang dengan lingkungannya. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dengan subjek sebanyak 4 (empat) orang pedagang kaki lima yang dipilih secara purposive. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum, kebijakan, maupun analisis teknis bangunan, serta tidak mencakup pedagang di luar kawasan pasar, sehingga fokus kajian tetap pada karakteristik spasial di lingkungan pasar tradisional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

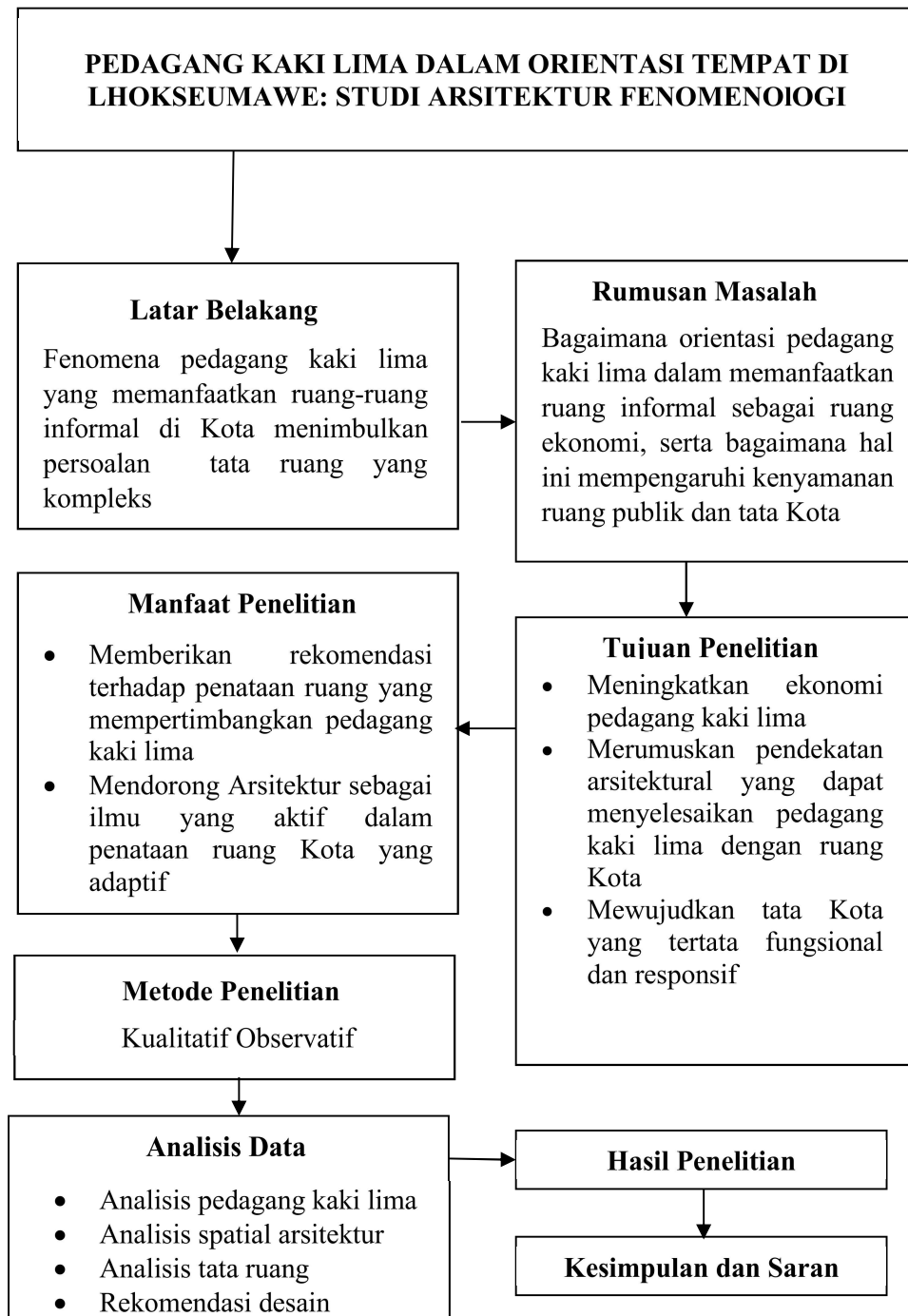
- **Bab 1:** Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
- **Bab 2:** Tinjauan Pustaka yang membahas teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini akan mengkaji literatur yang ada mengenai pedagang kaki lima, penggunaan ruang publik, dan kebijakan urban.
- **Bab 3:** Metodologi Penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab

ini akan menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan serta teknik observasi dan wawancara yang diterapkan.

- **Bab 4:** Hasil dan Pembahasan, yang menyajikan temuan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh. Bab ini akan membahas hasil observasi dan wawancara, serta mengaitkannya dengan teori yang ada.
- **Bab 5:** Kesimpulan dan Saran, yang merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta kebijakan yang dapat diambil. Bab ini akan menyimpulkan temuan utama dan memberikan saran praktis bagi pemerintah dan pedagang kaki lima.

1.7 Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan gambaran kerangka berpikir penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir (Analisa Penulis, 2026)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Orientasi Tempat Pedagang kaki Lima dan Fenomena Arsitektur

Orientasi lokasi pedagang kaki lima merujuk pada metode mereka dalam memilih, memahami, dan memanfaatkan ruang perkotaan untuk berdagang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman. Fenomena ini mencerminkan hubungan antara ruang fisik dan makna yang terbentuk, sehingga menjadi elemen dari kajian fenomena arsitektur perkotaan berikut beberapa terminologi yang terkait:

2.1.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia, pedagang kaki lima merujuk pada individu yang melakukan aktivitas jual beli di ruang-ruang publik, seperti trotoar, emperan toko, atau area sejenis, dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai pedagang kecil yang menjajakan dagangannya di tempat umum tanpa memiliki tempat usaha yang tetap. Keberadaan mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat urban, terutama dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.

Dalam ranah bahasa Inggris, istilah yang setara dengan pedagang kaki lima adalah *street vendor*. Mengacu pada definisi yang terdapat dalam *Oxford Learner's Dictionary* maupun *Cambridge Dictionary*, *street vendor* adalah seseorang yang menjual barang di jalanan, umumnya menggunakan kios kecil atau gerobak. Fenomena ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain, dengan karakteristik yang kurang lebih sama, yaitu menjual produk secara informal di area publik. Dengan demikian, baik pedagang kaki lima maupun *street vendor* memegang peranan penting dalam sektor ekonomi informal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Secara konteks arsitektur, pedagang kaki lima tidak hanya dipahami sebagai pelaku ekonomi informal yang menjajakan barang dagangan di ruang publik, tetapi juga sebagai agen pembentuk ruang kota secara organik. Mereka menciptakan konfigurasi spasial yang adaptif dan situasional berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan spasial yang mendesak, dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada seperti trotoar, tiang, pepohonan, atau dinding bangunan sebagai struktur pendukung aktivitasnya, sehingga secara tidak langsung mereka mendesain ulang ruang Kota berdasarkan logika fungsional dan interaktif (Setiawan et al., 2020). Dalam pendekatan fenomenologi arsitektur, ruang yang digunakan oleh pedagang kaki lima bukanlah ruang yang statis, melainkan ruang yang hidup dan penuh makna karena dimaknai, dikelola, dan dikreasikan kembali oleh penggunanya. Orientasi spasial mereka mengutamakan efisiensi akses, visibilitas terhadap arus lalu lintas pejalan kaki, dan perlindungan terhadap elemen alam seperti hujan dan matahari, menunjukkan bahwa praktik spasial mereka mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari desain arsitektur yang intuitif. Oleh karena itu, memahami pedagang kaki lima dalam kerangka arsitektur memberikan peluang untuk merumuskan strategi desain perkotaan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan (Sandhika et al., 2024).

Pedagang kaki lima merupakan individu atau kelompok pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan jual beli secara informal di ruang-ruang publik kota dengan sarana dan prasarana yang sederhana serta bersifat mobile. Mereka hadir di area seperti trotoar, tepi jalan, depan toko, atau ruang transisi publik lainnya, tanpa memiliki tempat usaha tetap yang secara legal diformalkan. Berangkat dari pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan istilah *street vendor* dalam konteks internasional, pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai bagian dari sektor ekonomi rakyat yang menyediakan kebutuhan harian masyarakat secara cepat, murah, dan mudah dijangkau.

2.1.2 Orientasi Ruang

Secara etimologis, istilah orientasi ruang terdiri dari dua unsur kata, yaitu orientasi dan ruang yang masing-masing memiliki akar kata dan

makna historis yang menarik (Murdaria, 2020). Kata orientasi berasal dari bahasa Latin *orientare*, yang secara harfiah berarti menghadap ke timur. Kata ini berasal dari akar kata *oriens*, yang berarti timur atau tempat matahari terbit. Dalam tradisi kuno, arah timur dianggap penting sebagai titik acuan karena merupakan tempat munculnya matahari, sehingga banyak peradaban menggunakan arah timur sebagai dasar penentuan arah lainnya. Seiring waktu, makna kata orientasi berkembang menjadi proses penentuan arah atau posisi dalam suatu sistem, baik secara fisik maupun konseptual. Dalam bahasa Indonesia, orientasi juga digunakan dalam arti yang lebih luas seperti pengenalan, pemahaman awal terhadap suatu lingkungan, atau penyesuaian diri terhadap suatu kondisi baru.

Sementara itu, kata ruang memiliki akar dari bahasa Sanskerta, yakni *rama*, yang memiliki makna tempat, wilayah, atau area yang dapat ditempati (kamus bahasa Sanskerta). Dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia modern, ruang merujuk pada suatu area yang memiliki dimensi fisik, dapat ditempati, serta memiliki batasan tertentu. Konsep ruang tidak hanya terbatas pada bentuk fisik seperti ruangan dalam bangunan, tetapi juga mencakup ruang abstrak yang berhubungan dengan fungsi, kegiatan, hingga makna simbolis dalam suatu konteks tertentu. Dalam berbagai ilmu, seperti geografi, arsitektur, hingga ilmu sosial, ruang dipahami sebagai elemen penting dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, kata ruang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman tentang struktur dan pola aktivitas manusia.

Dengan menggabungkan kedua unsur tersebut, istilah orientasi ruang secara etimologis dapat dimaknai sebagai kemampuan atau proses dalam menentukan arah, posisi, serta memahami hubungan spasial dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Dalam konteks akademik, orientasi ruang sering digunakan untuk merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengenali lokasi, mengingat posisi objek dalam ruang, serta menavigasi lingkungan sekitarnya. Istilah ini banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti geografi, psikologi kognitif, pendidikan, hingga arsitektur.

Pemahaman terhadap orientasi ruang penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan fisik maupun sosial di sekitarnya. Dengan demikian, pemahaman etimologis terhadap istilah ini memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami aplikasinya dalam berbagai konteks keilmuan dan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan konteks arsitektur, orientasi ruang merujuk pada cara penempatan dan pengaturan ruang atau massa bangunan terhadap elemen-elemen lingkungan sekitarnya, seperti arah matahari, angin, akses, serta fungsi ruang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kenyamanan termal, efisiensi energi, serta hubungan spasial yang baik antara ruang dalam dan ruang luar (Yosiani, 2014). Orientasi ruang juga mencakup bagaimana suatu ruang dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami, ventilasi silang, visibilitas, dan keterhubungan antaraktivitas pengguna (Ernst and Peter Neufert, 2012). Lebih dari itu, dalam pendekatan fenomenologi arsitektur, orientasi ruang dipahami sebagai hasil dari pemaknaan dan pengalaman manusia dalam menjelajahi atau menghuni suatu ruang, di mana arah memiliki dimensi fungsional sekaligus simbolis (Ummah, 2019). Dalam ranah perancangan Kota dan ruang publik, orientasi ruang juga turut memengaruhi bagaimana manusia berinteraksi, bergerak, dan merasa nyaman di dalam ruang tersebut (LeGates & Lefebvre, 2015).

Istilah orientasi ruang mengacu pada pengenalan dan penentuan arah atau posisi seseorang dalam sebuah area tertentu, yang secara historis berawal dari kata Latin yang berarti menghadap ke timur. Ruang yang dimaksud dapat berupa ruang nyata dengan batasan fisik maupun ruang abstrak yang berkaitan dengan aktivitas dan makna budaya (Azis et al, 2021).

2.1.3 Ruang Kota

Ruang publik merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Namun, dalam konteks pedagang kaki lima di Lhokseumawe, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial,

tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi informal yang terbentuk dari aktivitas keseharian pedagang.

Sementara itu, ruang Kota pasar merupakan bagian dari ruang Kota yang secara khusus berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan barang dan jasa (Planologi et al, 2021). Ruang ini mencakup area-area yang menjadi tempat interaksi antara pedagang dan pembeli, baik dalam bentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, maupun area perdagangan informal seperti pedagang kaki lima atau pasar tumpah. Ruang kota pasar memiliki karakteristik tersendiri, seperti tingginya intensitas aktivitas, mobilitas manusia yang tinggi, serta keberagaman sosial yang muncul dari interaksi ekonomi sehari-hari. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi, ruang kota pasar juga berfungsi sebagai ruang sosial tempat terjadinya pertukaran budaya, informasi, dan relasi antarindividu dalam masyarakat.

Ruang kota (urban space) dibahas sebagai elemen penting dalam perencanaan dan desain kota. Ruang kota mencakup area antara bangunan yang digunakan untuk berbagai aktivitas manusia, seperti jalan, taman, alun-alun, dan ruang publik lainnya. Dalam konteks arsitektur, ruang kota tidak hanya dilihat sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial yang membentuk pengalaman dan identitas kota. Salah satu pendekatan yang dibahas dalam *The City Reader* adalah konsep "imageability" oleh Kevin Lynch, yang menekankan pentingnya elemen-elemen kota seperti jalur, batas, distrik, node, dan landmark dalam membentuk persepsi dan navigasi warga kota terhadap lingkungan mereka. Elemen-elemen ini membantu menciptakan struktur mental Kota yang mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dengan ruang Kota (LeGates & Lefebvre, 2015).

Pada akhirnya, ruang kota dapat dipahami bukan hanya sebagai wilayah fisik yang diisi oleh bangunan dan infrastruktur, tetapi sebagai ruang hidup yang terus dibentuk oleh aktivitas dan interaksi manusia. Ia merupakan cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menghuninya. Kehadiran ruang-ruang seperti pasar tidak hanya

memfasilitasi transaksi, tetapi juga menjadi titik temu berbagai lapisan sosial yang memperkaya kehidupan kota itu sendiri. Sejalan dengan pandangan Kevin Lynch mengenai pentingnya elemen-elemen visual dalam membentuk persepsi kota, penataan ruang kota seharusnya mempertimbangkan pengalaman warganya secara utuh, baik secara fungsional maupun emosional. Oleh karena itu, ruang kota idealnya dirancang sebagai tempat yang tidak hanya efisien secara tata guna lahan, tetapi juga hangat, inklusif, dan mampu membangun keterhubungan antarindividu dalam kerangka kehidupan urban yang terus berkembang.

2.2 Permasalahan Tata Ruang Kota Di Negara Berkembang

Permasalahan di ruang kota cukup beragam, namun penulis hanya mengambil permasalahan yang relevan dengan permasalahan pedagang kaki lima di ruang kota. berikut beberapa permasalahan di ruang Kota :

2.2.1 Sejarah Tata Ruang Kota

Sejarah tata ruang kota di negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara, mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Pada zaman kuno, Kota-Kota seperti Mohenjo-Daro dan Roma dirancang dengan mempertimbangkan arah mata angin dan akses terhadap sumber daya alam, mencerminkan nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat setempat (Turner, 1982). Namun, dengan kedatangan kekuatan kolonial Eropa, sistem tata ruang yang lebih pragmatis dan fungsional diperkenalkan, yang sering kali mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat (Lefebvre, 1991). Hal ini menciptakan pemisahan spasial antara area elit dan masyarakat lokal, yang berujung pada ketimpangan dalam akses terhadap layanan dan infrastruktur. Setelah kemerdekaan, banyak negara di Asia Tenggara mengalami urbanisasi yang cepat, di mana pertumbuhan populasi yang pesat menyebabkan tekanan pada infrastruktur kota yang sudah ada. Dalam menghadapi keterbatasan ruang formal, masyarakat berpenghasilan rendah *sering kali* membangun permukiman informal dan berpartisipasi dalam ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima (Al-Jundi et al., 2022). Di era modern, banyak kota mulai

mengadopsi model perencanaan yang lebih sistematis, meskipun sering kali tidak kontekstual dengan kondisi lokal. Munculnya inisiatif dari komunitas dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ruang publik, seperti taman komunitas dan jalur pejalan kaki yang lebih ramah, menunjukkan upaya untuk menciptakan tata ruang yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Orientasi Kota tidak semata berdasarkan pertimbangan teknis, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat setempat. Perencanaan Kota-Kota seperti Yogyakarta, Ayutthaya, dan Luang Prabang menunjukkan bahwa arah bangunan, sumbu jalan, serta titik pusat kota sering dipengaruhi oleh prinsip kosmologi dan kepercayaan lokal. Namun, perubahan signifikan terjadi ketika pemerintahan kolonial Eropa mulai memperkenalkan sistem tata ruang yang lebih pragmatis, militeristik, dan fungsional. Warisan ini terus berlanjut pasca-kolonial dalam bentuk perencanaan teknokratis yang *sering kali* gagal memahami dinamika sosial ekonomi warga Kota (Purwani, 2016).

Keterbatasan sistemik dalam menyediakan ruang usaha yang layak bagi kelompok ekonomi bawah telah melahirkan praktik adaptif, salah satunya adalah aktivitas pedagang kaki lima. Fenomena ini menjadi pemandangan umum di hampir seluruh kota besar Asia Tenggara seperti Jakarta, Bangkok, hingga Ho Chi Minh City. Para pedagang memanfaatkan sela-sela ruang kota yang tak termanfaatkan secara formal, seperti trotoar dan badan jalan. Keberadaan mereka kerap memicu kontroversi, dianggap "mengganggu ketertiban", padahal justru menjadi penyokong ekonomi perkotaan yang tangguh dan fleksibel.

Dalam perspektif fenomenologi arsitektur, ruang tidak hanya dipahami sebagai wadah fisik, melainkan sebagai hasil dari pengalaman, interaksi, dan penyesuaian manusia. Di kawasan Asia Tenggara, ruang informal yang digunakan pedagang kaki lima mencerminkan fleksibilitas dalam memaknai ruang. Mereka menciptakan struktur sederhana, memodifikasi elemen lingkungan seperti tiang, tembok, atau bahkan pepohonan untuk menunjang

aktivitas berdagang. Ruang ini lahir bukan dari perencanaan birokratis, melainkan dari kebutuhan dan kreativitas yang berkembang di lapangan.

Permasalahan yang dihadapi kota-kota berkembang di Asia Tenggara bukan hanya menyangkut kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga bagaimana ruang dikelola secara adil. Banyak kebijakan tata ruang justru mendiskriminasi kelompok informal, termasuk pedagang kaki lima, melalui penertiban yang bersifat koersif. Padahal, ruang publik seharusnya menjadi milik bersama yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan baru dalam perencanaan kota perlu mempertimbangkan keadilan spasial dan partisipasi warga dalam proses perancangannya.

Dengan demikian, perkembangan tata ruang kota menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan formal dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut tercermin pada keberadaan pedagang kaki lima di kawasan pasar Kota Lhokseumawe yang memanfaatkan ruang-ruang informal sebagai tempat berdagang, sehingga membentuk pola pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya mengikuti perencanaan Kota secara formal.

2.2.2 Pola Konsentrasi Pada Tata Ruang Kota

Pola yang menjadi konsentrasi pada ruang kota sering kali terletak di area yang memiliki aksesibilitas tinggi dan kepadatan populasi yang signifikan (LeGates & Lefebvre, 2015). Lokasi-lokasi ini biasanya mencakup pusat-pusat perbelanjaan, stasiun transportasi umum, dan area yang dekat dengan institusi pendidikan atau tempat kerja. Misalnya, di Kota-Kota besar seperti Jakarta, kantung-kantung ini dapat ditemukan di sepanjang jalan-jalan utama yang ramai, di dekat stasiun kereta api, atau di sekitar pusat perbelanjaan besar. Di tempat-tempat ini, pedagang kaki lima beroperasi dengan menjajakan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, menjadikan mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal.

Kantung-kantung kota yang terletak di area dengan aksesibilitas tinggi dan kepadatan populasi yang signifikan sering kali menghadapi berbagai

masalah yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah penyerobotan lahan. Pedagang kaki lima, meskipun berkontribusi pada ekonomi lokal, sering kali menduduki ruang publik yang seharusnya digunakan untuk tujuan lain, seperti jalur pejalan kaki atau ruang terbuka hijau. Hal ini dapat menyebabkan konflik dengan pemerintah kota dan mengganggu fungsi ruang publik yang seharusnya inklusif bagi semua warga.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur menjadi masalah signifikan di kantung-kantung kota ini. Dengan tingginya kepadatan populasi, ruang publik yang ada sering kali tidak memadai untuk menampung arus pejalan kaki dan aktivitas perdagangan. Kurangnya fasilitas seperti tempat duduk, sanitasi, dan pencahayaan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak aman bagi pedagang dan konsumen. menekankan bahwa desain ruang publik yang buruk dapat memperburuk kualitas hidup di area tersebut dan mengurangi interaksi sosial yang positif (LeGates & Lefebvre, 2015).

Dari perspektif arsitektur, tantangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk perencanaan kota yang lebih baik. Ruang publik yang dirancang dengan baik harus mampu mendukung aktivitas perdagangan sambil tetap menjaga kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Desain yang memperhatikan aksesibilitas dan interaksi sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah bagi pedagang kaki lima dan konsumen. Namun, jika perencanaan tidak dilakukan dengan baik, potensi untuk menciptakan ruang sosial yang berkelanjutan dapat hilang, dan masalah seperti kemacetan, polusi, dan ketidakadilan sosial dapat semakin memburuk.

Kantung-kantung kota yang dihuni oleh pedagang kaki lima menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyerobotan lahan, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan perencanaan kota. Memahami masalah ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih baik yang dapat menciptakan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup di Kota-Kota dan memastikan bahwa semua warga, termasuk

pedagang kaki lima, dapat berkontribusi pada kehidupan sosial dan ekonomi yang dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut, pola konsentrasi aktivitas di ruang Kota cenderung terbentuk pada area dengan tingkat aksesibilitas dan intensitas pergerakan yang tinggi. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terlihat pada pemilihan lokasi berdagang oleh pedagang kaki lima di kawasan pasar yang cenderung berada pada jalur utama, area parkir, dan ruang transisi yang memiliki potensi interaksi ekonomi yang tinggi.

2.2.3 Ruang Publik di Ruang Kota

Ruang publik di perkotaan memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial, identitas komunitas, dan dinamika ekonomi. Menurut LeGates & Lefebvre (2015) Ruang publik mencakup area seperti taman, plaza, trotoar, dan jalan yang dirancang untuk digunakan oleh masyarakat secara bebas. Ruang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai arena untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai contoh, pedagang kaki lima sering kali memanfaatkan ruang publik untuk berjualan, menciptakan suasana yang hidup dan dinamis, serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap barang dan jasa yang terjangkau. Kehadiran pedagang kaki lima di ruang publik tidak hanya menambah keragaman pilihan bagi konsumen, tetapi juga menciptakan interaksi sosial yang kaya, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan berinteraksi.

Dalam konteks ini, desain ruang publik yang baik sangat penting untuk mendukung interaksi sosial yang positif. LeGates & Lefebvre (2015) menekankan bahwa ruang publik yang dirancang dengan baik, dengan mempertimbangkan elemen seperti aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan, dapat meningkatkan kualitas hidup di kota. Ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki, dilengkapi dengan tempat duduk, pencahayaan yang baik, dan fasilitas sanitasi, dapat mendorong masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara warga kota. Desain yang memperhatikan kebutuhan pengguna ini juga dapat

mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua kalangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gehl j (2010) Dalam bukunya *Cities for People*, ia juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa ruang publik yang dirancang untuk mendukung aktivitas sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan. Gehl berargumen bahwa ruang publik yang aktif dan menarik dapat mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup, terutama di Kota-Kota yang padat penduduk. Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bersantai hingga berinteraksi, sehingga masyarakat merasa lebih terhubung dengan lingkungan mereka. Selain itu, penelitian oleh Carr & Francis, (2007) *Public Space* juga menyoroti pentingnya desain ruang publik yang memperhatikan kebutuhan pengguna, dengan menekankan bahwa ruang publik yang baik harus dapat mengakomodasi berbagai aktivitas dan interaksi sosial serta ruang publik yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kota.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Jacobs (1961) *The Death and Life of Great American Cities* menekankan bahwa keberagaman fungsi dan aktivitas di ruang publik sangat penting untuk menciptakan kehidupan kota yang dinamis. Jacobs berargumen bahwa ruang publik yang memiliki berbagai fungsi, seperti tempat berjualan, tempat berkumpul, dan ruang untuk kegiatan budaya, dapat menarik lebih banyak orang dan menciptakan suasana yang lebih hidup. Dengan demikian, penting bagi perencana kota untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam merancang ruang publik yang efektif dan inklusif. Ruang publik yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi kota.

Ruang publik di perkotaan merupakan elemen kunci dalam menciptakan interaksi sosial yang positif dan mendukung kehidupan komunitas. Dengan memahami pentingnya desain ruang publik yang baik serta peran pedagang

kaki lima dalam menciptakan suasana yang dinamis, kita dapat merumuskan kebijakan perencanaan yang lebih baik untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ruang publik yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara warga kota, menjadikannya sebagai pusat kehidupan sosial yang berkelanjutan (Arafat et al., 2026).

Dengan demikian, ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai ruang yang mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ruang publik di kawasan pasar dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai ruang ekonomi informal, yang menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang dari ruang bersama menjadi ruang produktif yang dimaknai secara langsung oleh penggunanya.

2.3 Orientasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaan

Orientasi pedagang kaki lima di perkotaan merupakan salah satu faktor yang mendorong pedagang liar untuk menjadikan ruang informal sebagai ruang karya mereka. Masyarakat berpenghasilan rendah di ruang perkotaan menjadi faktor terciptanya ruang pedagang kaki lima.

2.3.1 Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perkotaan

Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan ekonomi. Dalam LeGates & Lefebvre (2015) Penulis menyoroti bagaimana kelompok ini sering kali terpinggirkan dalam struktur sosial dan ekonomi kota, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Aktivitas di Perkotaan

Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah: masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tinggal di daerah yang kurang terlayani, di mana akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik sangat terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Banyak anggota masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di perumahan yang tidak layak, seperti rumah susun yang padat atau daerah

kumuh. Kondisi ini sering kali disertai dengan masalah sanitasi, kebersihan, dan keamanan yang rendah, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Banyak individu dalam kelompok ini terlibat dalam ekonomi informal, seperti pedagang kaki lima atau pekerja harian, yang tidak memiliki perlindungan kerja atau akses ke tunjangan sosial. Meskipun ekonomi informal dapat memberikan sumber pendapatan, ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan pekerjaan ini *sering kali* membuat mereka rentan terhadap kemiskinan (LeGates & Leuvebre, 2015).

Kelas sosial dan dinamika kelas: Terdapat tiga kelas yang menjadi acuan, di antaranya Kelas Pekerja. Masyarakat berpenghasilan rendah sering kali dikategorikan sebagai kelas pekerja, yang mencakup individu yang bekerja di sektor-sektor dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak stabil. Kelas ini sering kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki sedikit kesempatan untuk mobilitas sosial. Kelas Menengah Rendah: Beberapa individu dalam masyarakat berpenghasilan rendah mungkin tergolong dalam kelas menengah rendah, yang memiliki sedikit lebih banyak sumber daya dan akses dibandingkan dengan kelas pekerja. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan dalam hal keamanan pekerjaan dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik. Kelas Elite dan Ketidaksetaraan: Dalam konteks perkotaan, ketidaksetaraan antara kelas berpenghasilan rendah dan kelas elit semakin mencolok. Kelas elite, yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, *sering kali* mengabaikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, menciptakan jurang yang lebih dalam antara kedua kelas tersebut (LeGates & Lefebvre, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki keterbatasan dalam mengakses ruang dan peluang ekonomi formal, sehingga mendorong munculnya aktivitas ekonomi informal. Dalam penelitian ini, pedagang kaki lima di kawasan pasar Kota Lhokseumawe merupakan representasi dari kelompok tersebut yang memanfaatkan ruang kota sebagai strategi bertahan hidup melalui aktivitas berdagang.

2.4 Orientasi Ruang Pedagang Kaki Lima di Lhokseumawe

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe menciptakan masalah terkait penggunaan ruang publik yang sering kali tidak terorganisasi dengan baik. Banyak pedagang memilih lokasi yang strategis, seperti di dekat pusat perbelanjaan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun ini mempermudah akses bagi masyarakat, sering kali keberadaan mereka mengganggu alur lalu lintas pejalan kaki dan penggunaan ruang publik oleh warga. Interaksi yang terjadi di ruang tersebut memang dinamis, namun dalam beberapa kondisi justru menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna lain yang tidak terlibat dalam transaksi.

Ruang publik yang seharusnya memfasilitasi interaksi sosial sering kali tidak didesain dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan semua pengguna. Pedagang kaki lima menggunakan gerobak atau tenda yang, meskipun fungsional, tidak selalu memenuhi standar kebersihan dan estetika ruang publik. Desain yang fleksibel memungkinkan pedagang berpindah tempat sesuai dengan arus pengunjung, tetapi hal ini juga berisiko menimbulkan kesan sesak dan tidak teratur.

Selain itu, meskipun elemen arsitektur seperti tempat duduk, pencahayaan, dan aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna, sering kali ruang yang tersedia tidak cukup memadai untuk menampung banyaknya pedagang dan konsumen yang berinteraksi. Trotoar yang sempit dan minimnya area duduk yang nyaman mengurangi kualitas ruang publik ini. Dalam konteks ini, ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pedagang untuk berdagang dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan ruang secara nyaman dan aman.

Secara keseluruhan, masalah yang muncul di Lhokseumawe terkait orientasi ruang pedagang kaki lima adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan arsitektural. Tanpa perencanaan dan desain ruang publik yang baik, interaksi sosial yang diharapkan dapat terhambat, dan aktivitas perdagangan justru menambah keruwetan di ruang yang semestinya menjadi tempat yang nyaman dan inklusif bagi semua pengguna (Nia Asari, 2023).

Dengan demikian, orientasi ruang pedagang kaki lima tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, tetapi juga oleh faktor ekonomi, sosial, dan kemudahan akses. Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dari cara pedagang memilih dan menata lokasi berdagang di kawasan pasar berdasarkan potensi keramaian, visibilitas, serta kedekatan dengan arus pergerakan pembeli.

2.5 Orientasi Ruang Arsitektur Arsitektur Pedagang kaki Lima

Orientasi ruang dalam konteks pelaku usaha informal mencerminkan bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan elemen-elemen ruang kota secara adaptif untuk menunjang aktivitas ekonominya. Dalam kajian arsitektur, orientasi ruang bukan sekadar tentang posisi atau arah tempat berdagang, tetapi juga menyangkut bagaimana ruang diinterpretasikan, dimodifikasi, dan dikonstruksi ulang berdasarkan kebutuhan dan konteks sosial-ekonomi.

Pelaku usaha informal cenderung memilih ruang-ruang kota yang memiliki visibilitas tinggi dan aksesibilitas yang baik, seperti trotoar, bahu jalan, depan toko, atau area sekitar fasilitas umum. Pemilihan ini bukan tanpa alasan; lokasi-lokasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan arus pejalan kaki atau kendaraan, yang memperbesar peluang transaksi. Dalam perspektif desain arsitektural, mereka secara tidak langsung membentuk ruang-ruang mikro baru di tengah-tengah ruang kota yang berskala makro.

Dari sudut pandang spasial, kegiatan ini menunjukkan adanya praktik *tactical urbanism*, yaitu penggunaan ruang publik secara spontan dan fungsional, meskipun tidak sesuai dengan rencana induk tata kota. Orientasi terhadap elemen-elemen seperti arah matahari, perlindungan dari hujan, dan arah angin pun turut dipertimbangkan secara intuitif. Penempatan tenda, gerobak, atau meja dagangan dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan pengunjung dan efisiensi operasional.

Dalam praktiknya, elemen-elemen arsitektur informal ini sering memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar: pagar, tiang listrik, pohon, hingga dinding bangunan sebagai bagian dari struktur ruang dagang mereka. Proses ini menunjukkan bahwa pelaku usaha informal tidak hanya mengambil ruang,

tetapi juga mendesain ulang fungsi ruang kota berdasarkan kebutuhan langsung, menjadikannya ruang hidup yang dinamis.

Meskipun banyak dianggap mengganggu keteraturan kota, fenomena ini justru memperlihatkan bagaimana ruang publik dapat dimaknai secara beragam. Dalam studi arsitektur kontemporer, pendekatan semacam ini membuka diskusi tentang pentingnya perencanaan kota yang lebih adaptif, kontekstual, dan inklusif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat urban.

Berdasarkan konsep tersebut, pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas dan bentuk ruang. Dalam penelitian ini, ruang berdagang dipahami sebagai ruang yang terbentuk melalui praktik penggunaan sehari-hari oleh pedagang.

2.6 Karakter Orientasi Ruang Pedagang Kaki Lima di Perkotaan

Karakter orientasi ruang pedagang kaki lima di wilayah perkotaan mencerminkan pola adaptasi yang berlangsung secara alami dan bersifat praktis, meskipun sering kali tidak selaras dengan perencanaan tata ruang kota yang formal. Umumnya, pedagang kaki lima memilih lokasi-lokasi yang dianggap strategis dan memiliki tingkat keterlihatan serta aksesibilitas yang tinggi, seperti trotoar, tepi jalan, atau area yang berdekatan dengan fasilitas publik. Keputusan pemilihan tempat tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain kemudahan dijangkau oleh konsumen, intensitas lalu lintas pejalan kaki, dan kedekatannya dengan pusat aktivitas warga (Widjajanti, 2014).

Dalam kerangka fenomenologi arsitektur, ruang yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik, tetapi juga memiliki dimensi simbolik yang merefleksikan fungsi ekonomi dan sosial. Para pedagang ini kerap menyusun ulang ruang secara fleksibel dan kreatif, misalnya dengan menggunakan tiang, pagar, maupun dinding bangunan sebagai bagian dari struktur penopang aktivitas dagang mereka (Kurniawan, 2019).

Lebih lanjut, praktik penggunaan ruang ini dapat dipahami sebagai bentuk *tactical urbanism*, yaitu strategi spontan dalam pemanfaatan ruang kota yang muncul dari kebutuhan nyata, bukan dari rancangan birokratis. Para pelaku

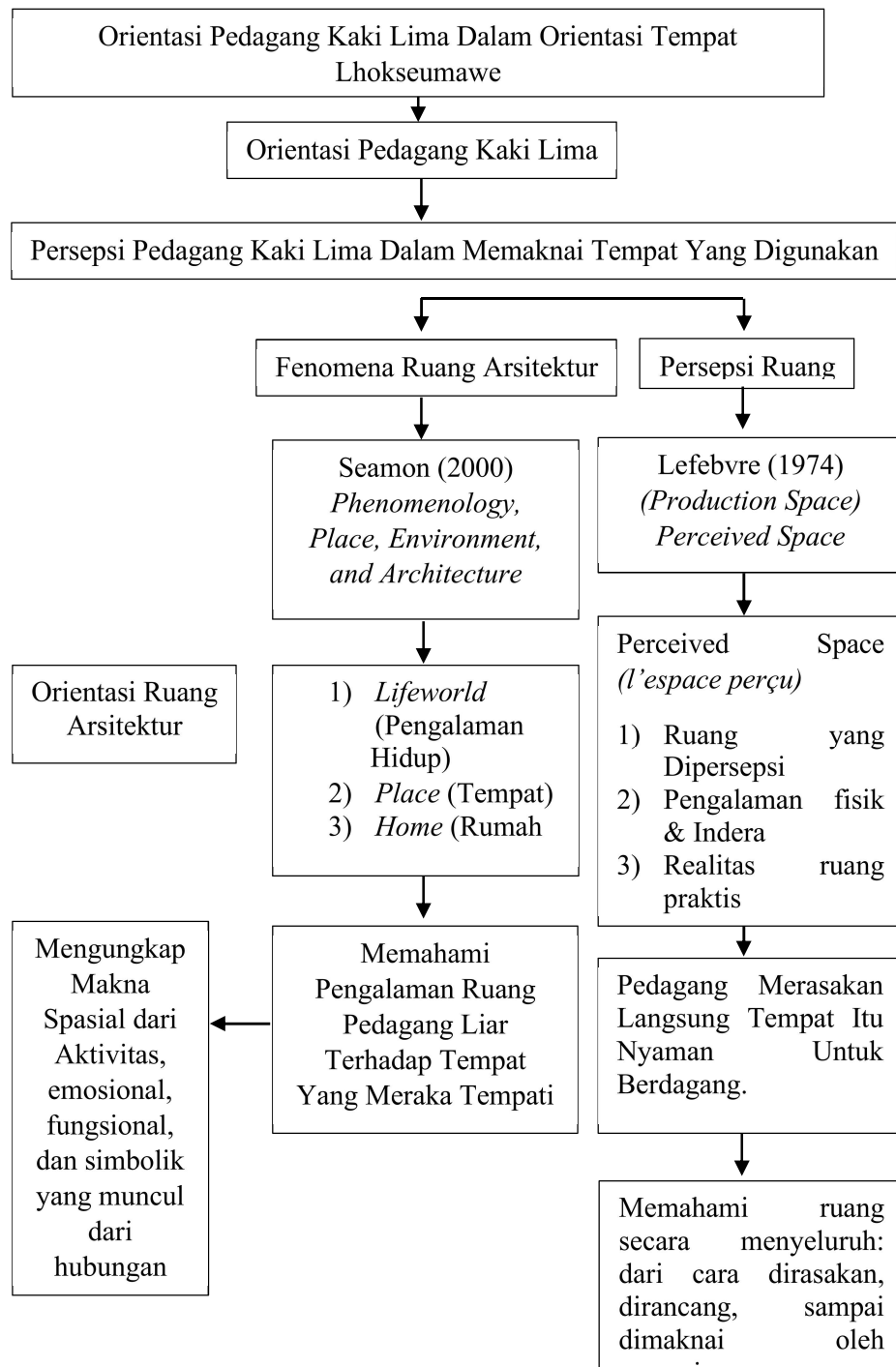
secara intuitif membaca dan menyesuaikan diri dengan konteks lingkungan di sekitarnya dalam menata ruang berdagang (Setia, 2009). Oleh sebab itu, orientasi ruang pedagang kaki lima tidak semata-mata berkaitan dengan aspek lokasi, melainkan juga dengan bagaimana ruang tersebut dimaknai, dihidupi, dan dikelola bersama. Dalam konteks inilah, pentingnya perencanaan kota yang adaptif dan inklusif menjadi krusial untuk mengakomodasi keberagaman praktik spasial yang tumbuh secara organik dari masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif fenomenologi arsitektur, ruang tidak hanya dipahami sebagai wadah fisik, tetapi sebagai ruang hidup (*Lifeworld*) yang terbentuk melalui pengalaman dan aktivitas manusia. Dalam penelitian ini, pedagang kaki lima memaknai ruang berdagang sebagai bagian dari pengalaman keseharian yang membentuk keterikatan terhadap tempat.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ruang dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai ruang yang dimaknai melalui aktivitas, pengalaman, dan interaksi pedagang kaki lima. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pedagang kaki lima di kawasan Pasar Buah Pusong dan Pasar Inpres Tumpok Teungoh memanfaatkan dan membentuk ruang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

2.7 Kerangka Teoritis

Berikut ini merupakan diagram gambaran kerangka teoritis penelitian ini, yaitu sebagai berikut



Gambar 2. 2 Kerangka Teoritis (Analisa Penulis, 2026)

1.1 Penelitian Terdahulu (Analisa Penulis, 2026)

Ta	Penulis	Tahun	Topik	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Gap/Cela
1	a. Mikha Christin Yunitasari b. Tjahya Supriatna c. Dety Mulyati	2023	Penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Pasar Minggu berdasarkan kebijakan pemerintah daerah	Menganalisis implementasi Pergub DKI No. 10/2015 oleh Satpol PP dalam penataan dan pemberdayaan PKL, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.	Kuantitatif, survei, 99 responden, analisis jalur (path analysis)	Orientasi kewirausahaan (inovatif, proaktif, risk-taking); kompetensi kewirausahaan (Suryana, 2011)	Orientasi kewirausahaan meningkatkan kinerja pedagang kaki lima, terutama melalui kompetensi, dengan keberanian mengambil risiko sebagai faktor dominan.	Fokus p kewirausahaan membahas dan peng
	a. Hariyanti b. Nuryati	2023	Kinerja PKL, orientasi & kompetensi kewirausahaan	Menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja PKL dengan kompetensi sebagai variabel mediasi	Kuantitatif, survei, 99 responden, analisis jalur (path analysis)	Orientasi kewirausahaan (inovatif, proaktif, risk-taking); kompetensi kewirausahaan (Suryana, 201	Fokus kewirausahaan berdamak positif pada kemampuan dan kinerja pedagang kaki lima, dengan keberanian mengambil risiko sebagai faktor utama. Pengaruh melalui kemampuan lebih kuat daripada langsung ke kinerj	Tidak pemanfaat orientasi
	a. Retno b. Widjajant	2009	Lokasi aktivitas PKL dalam ruang Kota	Mengkaji persoalan lokasi ruang aktivitas PKL dalam konteks ruang Kota dan mengisi kekosongan teori lokasi PKL dalam literatur perkotaan	Kajian literatur (literature review)	Teori sektor informal (de Soto, Hart, ILO), teori ruang dan perilaku spasial (Shirvani, Lefebvre, Soja)	PKL belum masuk dalam teori lokasi formal, padahal aktivitasnya perlu diakui sebagai bagian kota yang butuh ruang sesuai karakter kegiatannya.	Belum pengalana ruang dan pengguna
2	a. Alfanadi Agung b. Setiyawa c. Suzanna Ratih Sari d. Agung Budi e. Sardjono	2020	Persepsi terhadap ruang trotoar	Mengungkap persepsi atribut PKL terhadap trotoar sebagai ruang aktivitas, serta menjelaskan relevansi elemen fisik trotoar terhadap perilaku PKL	Metode kuantitatif dan kualitatif: kuesioner tertutup, person-centered mapping, behavior mapping	Teori persepsi lingkungan (Bell, 2001), teori atribut perilaku (Weisman, 1981), teori adaptasi (Altman, 1975	Trotoar Pandaran dinilai positif oleh PKL, dengan saran perbaikan desain dan penataan lapak agar lebih ramah bagi semua pengguna	Fokus pada membahas pengalaman mendala

Dialektik Ruang Liar di sepanjang Jalan Amudera Kota Lhokseumawe	a) Nia Asarai	2023	Membahas orientasi ruang pedagang liar di area Jalan Samudera, Lhokseumawe	orientasi pedagang liar di area Jalan Samudera, Lhokseumawe Memberikan pendekatan penyelesaian masalah ruang informal	Kualitatif eksploratif: observasi lapangan, wawancara, mapping area	Phenomenology Arsitektur (David Seamon) – konsep <i>Place, Lifeworld, Home</i>	Phenomenology Arsitektur (David Seamon) – konsep <i>Place, Lifeworld, Home</i>	ulang lokasi dan dimensi lapak Ruang informal pedagang liar memenuhi kebutuhan sumber daya, mendekatkan mereka ke aktivitas pasar, dan memanfaatkan	Sudah fenomena mengkaji konsep dan <i>home</i>
--	---------------	------	--	--	---	--	--	---	--

asarkan kelima penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai pedagang kaki lima masih didominasi oleh pendekatan ekonomi, kinerja, dan kebijakan penataan, serta sebagai pemanfaatan ruang. Meskipun beberapa penelitian telah menyinggung aspek spasial dan adaptasi pedagang terhadap lingkungan, pembahasannya masih terbatas pada fungsi dan dimensi pengalaman serta makna ruang secara mendalam. Bahkan pada penelitian yang mulai mengarah pada orientasi ruang, pendekatan fenomenologi arsitektur belum bersifat, khususnya dalam mengintegrasikan konsep *Place, Lifeworld*, dan *home* sebagai kerangka analisis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam memahami bagaimana membentuk orientasi tempat melalui interaksi keseharian dengan ruang yang mereka gunakan. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik hadir untuk mengisi celah tersebut antara kondisi fisik ruang, pengalaman, dan makna secara terintegrasi melalui pendekatan fenomenologi arsitektur di kawasan pasar Kota Lhokseumawe.